

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang kerap muncul di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara miskin. Kemiskinan adalah dimana kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat menikmati standar kesehatan, standar pendidikan dan standar kehidupan yang layak. Di Indonesia kemiskinan menjadi isu yang sangat hangat hingga saat ini, belum ada yang bisa menghilangkan isu kemiskinan yang ada di Indonesia.

Menurut Maipita (2014: 1) :

**Kemiskinan timbul karena adanya perbedaan kemampuan, kesempatan, pendapatan, serta perbedaan sumberdaya. Kemiskinan juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan bagi orang miskin untuk melaksanakan kegiatan, seperti tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.**

Kemiskinan banyak terdapat di daerah terisolir dan pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk yang miskin dipedalaman dikarenakan ketertinggalan dari berbagai aspek seperti melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, untuk mendapatkan perobatan, dan untuk mendapatkan kebutuhan dasar.

Menurut BPS (2016) Kemiskinan adalah “ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran”. Ukuran kemiskinan yaitu

menggunakan garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks, serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk penuntasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup di suatu wilayah tertentu. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, dan merupakan masalah klasik yang dihadapi sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan

memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor itu diantaranya Produk Domestik Bruto. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar, pengaruh perkembangan ekonomi tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Sukirno (2016: 34) :

**Produk Domestik Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tetapi juga penduduk negara lain yang menggunakan faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Yang operasinya membantu menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan dan sering juga membantu menambah ekspor.**

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia berusaha agar dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari negara lain. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia belum mampu melakukan hal tersebut, terlebih lagi saat sekarang ketika arus globalisasi yang tinggi mempersulit Indonesia untuk membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari negara lain. Dengan kondisi tersebut, Indonesia akhirnya harus mengikuti arus tersebut, yaitu mencoba membuka diri dengan menjalin kerjasama dengan negara lain untuk pembangunan nasional terutama pada sektor ekonomi nasional.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Menurut Samuelson & Nordhaus sebagaimana dikutip Nababan (2020: 12) :

**Pengangguran adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja namun masih aktif mencari kerja atau menunggu kesempatan kerja kembali. Agar terhitung sebagai pengangguran, seseorang harus melaporkan usaha spesifiknya dalam mencari pekerjaan (seperti melakukan wawancara kerja atau mengirim surat-surat lamaran).**

Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. Jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Setiap tahun jumlah penduduk pasti terus bertambah dan akan berdampak pada tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya dinegara berkembang laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerja) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan pekerjaan.oleh karena itu tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur.

Perbedaan terkait dengan upah minimum terhadap kemiskinan masih menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas. Menurut undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah minimum didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Upah diberikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Menurut Luthfiyah (2017: 8-9) :

**permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin tinggi upah atau gaji yang diberikan, maka akan mengakibatkan semakin sedikit permintaan tenaga kerja. Dengan terciptanya kesempatan kerja dan adanya peningkatan produktivitas sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan kesejahteraan bagi banyak penduduk. Jadi, kesempatan kerja merupakan tempat bagi penduduk dalam mendapatkan pekerjaan.**

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu, Produk Domestik Bruto (PDB), pengangguran, dan upah minimum. Data dari tahun 2010-2019 telah disajikan dalam Tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1.1. Data Jumlah Penduduk Miskin, Produk Domestik Bruto, Pengangguran, dan Upah Minimum di Indonesia Tahun 2010-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Produk Domestik Bruto (%)	Pengangguran (%)	Upah Minimum (rupiah)
2010	31.020.000	6.22	7.14	908.824
2011	29.890.000	6.49	7.48	988.829
2012	28.590.000	6.26	6.13	1.088.903
2013	28.550.000	5.73	6.17	1.296.908
2014	27.730.000	5.01	5.94	1.584.391
2015	28.592.790	4.88	6.18	1.790.342
2016	28.005.390	5.03	5.61	1.997.819
2017	27.771.220	5.07	5.50	2.137.198
2018	25.949.800	5.17	5.34	2.264.676
2019	25.143.120	5.02	5.28	2.400.000

**Sumber:** BPS (Badan Pusat Statistik), Lokadata.ID, Upah Minimum Regional Provinsi, Berbagai Sumber.

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa data jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2010-2019 menurun. Di tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 31.020.000 jiwa, dan menurun terus hingga menjadi 27.730.00 jiwa di tahun 2014. Di tahun 2015 naik menjadi 28.592.790 jiwa dan mengalami penurunan hingga menjadi 25.143.120 jiwa di tahun 2019.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) :

**komoditas makanan, faktor penambah angka penduduk miskin di Indonesia juga berasal dari komoditas bukan makanan diantaranya biaya perumahan, listrik, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang**

**kurang, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. rendahnya pengetahuan akan hidup sehat, tingkat kesehatan yang rendah, meningkatnya jumlah kematian, dan menurunnya jumlah kelahiran.**

Sementara itu pertumbuhan Produk Domestik Bruto selama kurun tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami fluktuatif. Produk Domestik Bruto sebesar 4,90 % tahun 2010 dan 5,02% tahun 2019, Hal ini disebabkan karena tumbuh baiknya sektor-sektor perindustrian maupun ekspor impor yang mempengaruhi peningkatan Produk Domestik Bruto Indonesia.

Menurut Sarwedi (2002: 18) :

**Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah penanaman modal asing langsung (*foreign direct invesment*).**

Sementara itu tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2019 cenderung fluktuatif, tingkat pengangguran sebesar 7,14% tahun 2010 dan tahun 2019 sebesar 5,28%.

Supriyatna(2016: 4) menyatakan bahwa:

**Penurunan angka pengangguran di Indonesia karena adanya perbaikan ekonomi, permintaan industri terhadap sumberdaya atau jangka kerja produktif mengalami peningkatan. Ketika penyerapan tenaga kerja di sektor primer seperti pertanian, manufaktur atau industri dan konstruksi merosot, sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan lain menopang dalam menyerap tenaga kerja.**

Kemudian Upah minimum di Indonesia meningkat. tahun 2010 upah minimum di Indonesia sebesar 908.824 rupiah dan di tahun 2019 meningkat menjadi 2.400.000.

Menurut Kaufman dalam kutipan Anggriawan (2016: 219) menyatakan bahwa:

**Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi penulis yang meneliti.
2. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengaruh Produk Domestik Bruto, pengangguran, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
3. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kemiskinan**

##### **2.1.1. Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan adalah fenomena yang sering kali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga sering dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Menurut Basri (2002: 282) menyatakan bahwa:

**Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketidadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar).**

Berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan.

Menurut Yacoub sebagaimana dikutip Ferezagia (2018: 2) menyatakan bahwa:

**kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara terutama di negara berkembang.**

Menurut Suliswanto (2010: 357-358) menyatakan bahwa:

**Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan.**

Dengan kata lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi.

Pertama, kemiskinan absolut, dimana pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pendapatan nasional yang diterima oleh masing masing golongan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

### **2.1.2 Penyebab Kemiskinan**

Menurut Purba, Tobing, dan Hutabarat sebagaimana dikutip Sarah(2021: 11-12) bahwa terdapat beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. *Policy induces processes* yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, reproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan ( *induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan yang katanya “antikemiskinan” tetapi kenyataanya justru dilestarikan.
- b. *Socio-economic dualism* yaitu gambaran kemiskinan yang diwariskan penjajah.
- c. *Population growth* yang menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh penambahan penduduk yang pesat.
- d. *Recources manangement and the environment* dimana kemiskinan terjadi karena adanya unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang sembarang

- tebang akan menurunkan produktivitas. Akibatnya petani bisa menjadi miskin.
- e. *Natural cycle and processes* di mana kemiskinan terjadi karena siklus alam, contohnya tinggal di lahan kritis adalah berbahaya dan kurang beruntung karena ketika musim hujan akan terjadi banjir dan pada musim kemarau akan kekurangan air sehingga mengakibatkan tidak maksimal produktivitasnya dan dapat disalagunakan terus-menerus.
  - f. *The marginalization of woman* yaitu diskriminasi kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari kaum laki-laki.
  - g. *Cultural and ethnic factors* yaitu faktor budaya dan etnik turut bekerja memelihara kemiskinan.
  - h. *Exploitative intermediation* yaitu keberadaan penolong yang menjadi penolong, seperti rentenir (lintah darat) sehingga yang ditolong tetap terjat dalam kemiskinan.
  - i. *Internal political fragmentation and civil stratfe* yaitu kemiskinan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politik yang kuat maka pada gilirannya dapat menjadi penyebab dari kemiskinan.
  - j. *Internanational processes* yaitu bekerja dengan sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Menurut Dowling dan Valenzuela sebagaimana dikutip Rini (2016: 20)

menyatakan bahwa:

**Masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh rendahnya modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, atau kemampuan membangun. Mereka juga memiliki modal fisik dalam jumlah yang sangat kecil. Lebih lanjut, jika mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik, mungkin mereka tidak memiliki kesempatan bekerja karena adanya diskriminasi**

Menurut Suwarsono sebagaimana dikutip Nurjanah (2017: 43) menyatakan

bahwa:

**Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan dan kesenjangan oleh kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai ekonomi daripada nilai yang lainnya. Seperti nilai politik mereka leluasa mempekerjakan kaum buruh dengan semena-mena. Dari berbagai kesenjangan ada di dalam kehidupan sosial yang membuat kaum**

**miskin menjadi semakin miskin dan orang-orang yang berada ditingkatkan menjadi semakin makmur**

### **2.1.3. Jenis-Jenis Kemiskinan**

Menurut Purba, Tobing, dan Hutabarat sebagaimana dikutip Sitio (2019:

18) bahwa kemiskinan dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu:

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan agar bisa bertahan hidup.**
- b. Kemiskinan relatif adalah konsep garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat.**
- c. Kemiskinan kultural adalah konsep mempersoalkan sikap seseorang yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif.**
- d. Kemiskinan struktural adalah konsep kemiskinan yang disebabkan karena kurangnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan tingginya kemiskinan.**

Menurut Subagio sebagaimana dikutip Ningsih (2022: 259) menyatakan

bahwa :

**berdasarkan kajian-kajian dari data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lainnya. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor non-alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lainnya.**

#### 2.1.4. Ukuran Kemiskinan

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi.

Badan Pusat Statistik (2020: 1) menyatakan bahwa:

**Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*based needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.**

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis kemiskinan Non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di pedesaan. Rumus perhitungan garis kemiskinan adalah:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan : GK = Garis kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Badan Pusat Statistik (2016) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari yang akan disetarakan dengan rupiah. Selanjutnya, 2.100 kalori per kapita per hari akan disetarakan dengan rupiah ketika pengukuran kemiskinan dilakukan di tiap hari daerah/ provinsi dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada suatu daerah/ provinsi tertentu. Pengukuran kemiskinan pada daerah tertentu. Pengukuran kemiskinan pada daerah provinsi akan menggunakan satuan rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu. Misalnya garis kemiskinan di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar Rp. 459,560,00 berbeda dengan garis kemiskinan di provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 333,561. Dan garis kemiskinan di provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp. 663.355 dan garis kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta sebesar Rp. 414.899.

Menurut Kuncoro (2003: 123) Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Soleh (2018: 83) menyatakan bahwa:

**Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang harus dimiliki penduduk perkapita perbulan guna menetapkan status kategori penduduk miskin. Bila pendapatan penduduk diatas garis tersebut, maka penduduk tidak dapat dikategorikan penduduk miskin. Bila pendapatan penduduk dibawah atau sama dengan garis kemiskinan maka penduduk tersebut masuk kategori penduduk miskin.**

## **2.2 Produk Domestik Bruto (PDB)**

### **2.2.1 Definisi Produk Domestik Bruto(PDB)**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak melakukan infrastruktur dan pembangunan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator perekonomian merupakan ukuran yang tepat sebagai tolak ukur untuk menilai perekonomian suatu negara.

Produk Domestik Bruto atau lebih dikenal dengan *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat termasuk warga negara asing suatu negara dalam satu tahun tertentu. GDP dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

McEachern sebagaimana dikutip Aritonang (2019: 15) menyatakan bahwa:

***Gross Domestic Product* hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses dan kemudian dijual lagi tidak dimasukkan dalam hitungan GDP, hal ini dilakukan untuk menghindari masalah penghitungan ganda. Perhitungan ganda dapat menyebabkan hasil dari perhitungan GDP tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya, sehingga dalam perhitungan tersebut hanya dilakukan perhitungan satu kali untuk setiap produk.**

Ada dua tipe *Gross Domestic Product*, yaitu PDB dengan harga berlaku atau PDB nominal, yaitu produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-haraga dimasa sekarang dan PDB dengan harga tetap atau PDB riil, yaitu produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga tetap. Semakin besar Produk Domestik

Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) suatu negara maka kinerja perekonomian di negara tersebut dianggap semakin baik. Dengan kata lain, PDB adalah indikator tingkat pendapatan suatu negara dalam satu periode yang telah ditentukan.

Menurut Mustika (2011: 18) menyatakan bahwa:

**Produk Domestik Bruto merupakan suatu indikator keberhasilan suatu negara dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila Produk Domestik Bruto negara tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan negara tersebut sangat baik karena Produk Domestik Bruto yang tercermin gambarkan angka yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas serta penurunan jumlah penduduk miskin.**

Menurut Mankiw sebagaimana dikutip Nassrullah (2020: 5) menyatakan bahwa:

**Produk Domestik Bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. PDB merupakan variabel ekonomi makro yang ada untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara.**

### 2.2.2 Perhitungan Domestik Bruto

Salah satu pendapatan nasional yang disajikan dalam bentuk statistik indonesia adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Purba, Tobing dan Hutabarat sebagaimana dikutip Rajagukguk (2020: 15) angka PDB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. pendekatan produksi.
2. pendekatan pengeluaran.
3. pendekatan pendapatan.

Menurut Mankiw dalam kutipan Rosalina (2016: 8-10) terdapat tiga pendekatan perhitungan PDB, yaitu:

1. **Metode output (*Output approach*)** atau metode produksi. Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik ini adalah dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industri origin). Nilai tambah = nilai input ( $PDB = \sum NT$ )
2. **Metode pendapatan (*Income Approach*)** metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi sederhana, sebagai berikut:  $Output = f(\text{tenaga kerja, barang/modal, uang, } \textit{entrepreneur skill})$ .  $PN = \text{upah/gaji tambah pendapatan bunga, tambah pendapatan sewa, tambah keuntungan.}$
3. **Metode pengeluaran (*Expenditure Approach*)** menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut periode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian: a. Konsumsi rumah tangga, b. Konsumsi pemerintah, c. Pengeluaran investasi/ pembentukan modal tetap Produk Domestik Bruto, d. Ekspor neto.  
 Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut :  $PDB = C+G+I+(X-M)$ . Kegunaan data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah: a. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara, b. Menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara, c. Menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri, d. Menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk, e. Mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Menurut Susanti et al sebagaimana dikutip Soleh (2011: 15) menyatakan bahwa:

- 1. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.**
- 2. PDB dihitung atas dasar konsep aliran (flow concept). Artinya perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDB, memungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.**
- 3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong perekonomian domestik.**

## **2.3. Pengangguran**

### **2.3.1. Definisi Pengangguran**

Pengangguran sering digunakan sebagai istilah untuk menyatakan orang yang tidak bekerja sama sekali. Pengertian ini adalah kurang tepat sebab tidak semua orang tidak bekerja disebut sebagai penganggur. Beberapa kelompok masyarakat seperti para ibu rumah tangga dengan alasan harus mengasuh anak dan mengurus keluarga, anak-anak muda yang harus sekolah atas kuliah dahulu, dan anak-anak orang kaya yang sudah memiliki kekayaan yang lebih dari cukup atau kemungkinan gajinya lebih kecil dari yang diharapkan biasanya tidak mau atau tidak sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kendatipun mereka tidak bekerja namun tidak disebut sebagai penganggur.

Menurut Sukirno (2016 : 330-331) pengangguran dapat digolongkan berdasarkan cirinya, yaitu sebagai berikut :

### **1. Pengangguran Terbuka**

**Pengangguran Terbuka** Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena itu dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

### **2. Pengangguran Tersembunyi**

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

### **3. Pengangguran Bermusim**

**Pengangguran bermusim** Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan

dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

#### 4. Setengah Menganggur

**Setengah menganggur** Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) pengangguran adalah :

- a.) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b.) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c.) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d.) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Aditya sebagaimana dikutip Ramadhan (2017: 3) menyatakan bahwa:

**Pengangguran atau tuna karya** adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada

#### 2.3.2. Dampak Pengangguran

Pengangguran yang terjadi dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk terhadap perekonomian maupun individu dan

masyarakat. Salah satu dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian yaitu menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Sedangkan salah satu dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para pengangguran memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran. Oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya.

Menurut Nanga, Muana dalam kutipan Zarkasi (2014: 50) dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat maupun perekonomian adalah:

- a. **Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin di capainya. Sehingga apabila kesejahteraan masyarakat rendah maka akan timbul masalah sosial, misalnya kemiskinan, ketimpangan, dan kesengsaraan.**
- b. **Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja menjadi merosot.**
- c. **Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Kehidupan penganggur harus dibiayai dengan investasi atau tabungan masa lalu atau pinjaman. Keadaan ini bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga menjadi kurang harmonis.**

Menurut Muhadir sebagaimana dikutip Ishak (2018: 30) menyatakan bahwa:

**Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai masyarakat pun akan lebih rendah.**

Menurut Arief dalam Gemmel sebagaimana dikutip Swaramarinda (2014:

67) menyatakan bahwa:

**Indonesia merupakan suatu kasus di mana pertumbuhan bertumpu pada industri padat modal dan pengeboran minyak bumi, ditambah dengan pengembangan pertanian yang cenderung hemat tenaga kerja. Jenis pengembangan demikian berarti bahwa permintaan akan tenaga kerja tidak terampil tetap rendah sehingga tingkat pengangguran bertambah dan hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan pasti naik**

### **2.3.3. Penyebab pengangguran**

Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa negara, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain-lain.

Menurut Franita (2019: 89-90) faktor penyebab pengangguran adalah:

- 1. sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pekerja, banyaknya para pencari pekerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.**
- 2. kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari pekerja, banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.**
- 3. kurangnya informasi, dimana para pekerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.**
- 4. kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan masih sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan.**
- 5. masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill.**
- 6. budaya malas yang masih menjangkit para pencari pekerja yang membuat para pencari pekerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.**

Menurut Sukidjo sebagaimana dikutip Sopianti (2013: 219) menyatakan bahwa:

- 1) **Keterbatasan jumlah lapangan kerja, sehingga tidak mampu menampung seluruh pencari kerja.**
- 2) **Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga pencari kerja tidak mampu mengisi lowongan kerjanm karena tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan.**
- 3) **Keterbatasan informasi, yakni tidak memiliki informasi dunia usaha mana yang memerlukan tenaga kerja serta persyaratan apa yang diperlukan.**
- 4) **Tidak meratanya lapangan kerja. Daerah perkotaan banyak tersedia lapangan pekerjaan sedangkan di pedesaan sangat terbatas.**
- 5) **Kebijakan pemerintah yang tidak tepat, yakni pemerintah tidak mampu mendorong perluasan dan pertumbuhan sektor modern.**
- 6) **Rendahnya upaya pemerintah untuk melakukan pelatihan kerja guna meningkatkan skill pencari kerja**

#### **2.4. Upah Minimum**

Upah minimum di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 (2013: 2) tentang upah minimum pasal 1 berbunyi: “Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman”.

Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya tingkat produksi disebut dengan efek skala produksi.
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan dan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).

Menurut Undang-undang No. 13 Republik Indonesia (2003: 4) tentang ketenagakerjaan pasal 30 bahwa:

**upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.**

Jadi dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari

para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang didalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Menurut Cahyaningtyas (2019: 2-7) faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah adalah:

### **1. Biaya Hidup**

**Perbedaan tingkat biaya hidup antar-daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja atas upah yang lebih tinggi pula. Untuk menunjang biaya hidup yang lebih layak, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di daerah dengan tingkat biaya hidup tinggi umumnya memberikan gaji pokok.**

### **2. Regulasi Pemerintah**

**UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan melarang perusahaan membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) dan upah kota/kabupaten (UMK).**

### **3. Kompensasi Perusahaan Lain**

**Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Karena itu, ini akan menjadi dasar menentukan seberapa besar perusahaan akan membayar imbalan karyawan.**

### **4. Kemampuan Perusahaan**

**Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawannya.**

### **5. Jenis Pekerjaan dan Tanggung Jawab**

**Perusahaan merupakan sebuah bentuk organisasi, bisnis yang menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan terukur, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.**

## 6. Peranan Serikat Buruh

**Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peran serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerja bersama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh memungkinkan perusahaan memenuhinya.**

### 2.5 Hubungan Variabel-variabel Penelitian

#### 2.5.1 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Produk Domestik Bruto Indonesia terus mengalami peningkatan, namun sangatlah di harapkan jika peningkatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum, peningkatan kesempatan tenaga kerja serta penurunan angka kemiskinan.

Mustika (2011: 18) menyatakan bahwa :

**Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu indikator keberhasilan suatu negara dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila Produk Domestik Bruto negara tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan negara tersebut sangat baik karena Produk Domestik Bruto yang tercermin gambarkan angka yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas serta penurunan kemiskinan.**

#### 2.5.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Masalah utama yang mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi

setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*).

Todaro sebagaimana dikutip Asrianti (2017: 40) menyatakan bahwa:

**Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, dan tidak pemerataan distribusi pendapatan. Sebagian besar didalamnya adalah mereka yang bekerja part time. Mereka yang bekerja secara tetap di sektor pemerintah dan swasta termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja “full time” relative berpenghasilan baik. Terdapat kemungkinan adanya penganggur yang menganggur secara sukarela serta kualifikasi percakapan. Mereka menolak jenis pekerjaan yang tidak disukai dan hal ini mereka menolak karena memiliki cukup sumber keuangan dari keluarga, teman atau pinjaman lainnya.**

### **2.5.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Penetapan upah minimum ditentukan oleh upah tahun berjalan dan pertumbuhan ekonomi nasional menurut PP No 78 Tahun 2015. Sebelum PP No 78 Tahun 2015 berlaku aturan UU No 13 Tahun 2003 yang menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja buruh.

### **2.6. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

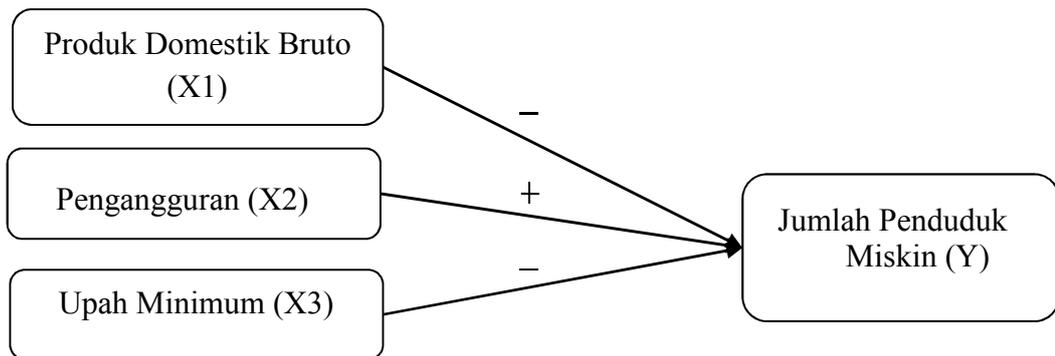
1. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2011) dengan judul “Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1990-2008”. Penelitian ini menggunakan metode OLS data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Variabel Pengaruh Domestik Bruto mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990-2008.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2020) dengan judul “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2018”. Penelitian ini menggunakan metode OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
  1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018. Semakin tinggi tingkat PDRB suatu wilayah, maka akan semakin mengurangi pula jumlah penduduk miskin di Indonesia.
  2. Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018. Penempatan upah minimum yang tidak hanya diterapkan pada lapangan kerja formal maupun informal mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan jika disertai peningkatan upah minimum secara terus menerus akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan.
  3. Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2019:63) dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja pemerintah, dan Investasi terhadap jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2017. Penelitian ini menggunakan metode OLS. Hasil penelitian :

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017.
2. Pengangguran memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017.
3. Belanja Pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017
4. Investasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017.
5. Berdasarkan Uji F, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017.

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (Produk Domestik Bruto, Pengangguran, dan Upah Minimum yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin). Setelah didapat tingkat signifikan setiap variabel bebas diharapkan mampu memberikan gambaran hubungan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Secara sederhana hal ini dapat ditampilkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Semakin tingginya tingkat Produk Domestik Bruto berdampak negatif terhadap tingkat penduduk miskin, maka diharapkan pendapatan nasional dapat menyebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, tingkat pengangguran akan berdampak positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Upah minimum berdampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin, maka diharapkan semakin tinggi upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

## 2.8 Hipotesis Penelitian

1. Produk Domestik Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
3. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah

penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan meliputi data kemiskinan Indonesia, data Produk Domestik Bruto, pengangguran, dan upah minimum di Indonesia. Objek penelitian ini adalah kemiskinan dimana peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh-pengaruh Produk Domestik Bruto, pengangguran, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode tahun 2000-2019.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPENAS dan yang dikumpulkan adalah meliputi data penduduk miskin, Produk Domestik Bruto, pengangguran, dan upah minimum di Indonesia. Jangka waktu data yang digunakan adalah tahun 2000-2019. Jenis data adalah data *time series* adalah data yang menggambarkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu atau periode secara historis.

### 3.3 Model Analisis

#### 3.3.1 Model Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \varepsilon_i; i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

Dimana :  $Y$  = Jumlah penduduk miskin ( jiwa).

$$\hat{\beta}_0 = \text{Intersep}$$

$$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3 = \text{Koefisien regresi}$$

$$X_1 = \text{Produk Domestik Bruto (\%)}$$

$$X_2 = \text{Pengangguran terbuka (\%)}$$

$$X_3 = \text{Upah minimum (Rp)}$$

$$\varepsilon_i = \text{Galat (Error term)}$$

#### 3.3.2 Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Produk Domestik Bruto, pengangguran, upah minimum) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (kemiskinan), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata = 5%

**a) Produk Domestik Bruto (X1)**

$H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$ , artinya Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

$H_1 : \hat{\beta}_1 < 0$ , artinya ada pengaruh negatif dan signifikan antara Produk Domestik Bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$  : koefisien regresi

$\beta_1$  : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya Produk Domestik Bruto secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya Produk Domestik Bruto secara parsial tidak berpengaruh signifikan jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2019

**b) Pengangguran (X2)**

$H_0 : \beta_2 = 0$  artinya, Pengangguran tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2019.

$H_1: \beta_2 > 0$  artinya, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$  : koefisien regresi

$\beta_2$  : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

### c) Upah Minimum (X3)

$H_0: \beta_3 = 0$  artinya, upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

$H_1: \beta_3 < 0$  artinya, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

Rumus mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$  : koefisien regresi

$\beta_3$  : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya upah minimum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2019. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

## 2. Uji Secara Simultan ( Uji F )

Uji F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut

:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0, i = 1,2,3$ , berarti variabel bebas secara serempak/ bersama-sama tidak berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i$  tidak semua nol ,  $i = 1,2,3$ , berarti variabel bebas secara serempak/ bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan  $\alpha$  dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

$$\text{Rumus untuk mencari } f_{\text{hitung}} \text{ adalah : } \frac{JKR (K-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya Koefisien Regresi

n : Banyaknya Sampel

Apabila nilai  $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpegaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### 3.3.3. Uji Keباikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel

terikat dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan suai model yang digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Menurut Widarjono (2005: 41) nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$  ;  $R^2 \rightarrow 1$  artinya “ antara 0 dan 1. Jika  $R^2$  mendekati angka 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.”

### 3.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

#### 3.4.1 Multikolinieritas

Menurut Widarjono, (2005: 131) ”multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai VIF  $\geq 10$  dan Tol  $\geq 0.1$  maka

dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya VIF  $\geq 10$  dan Tol  $\leq 0.1$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinieritas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinieritasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $< 0,95$  maka kolinieritas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai  $R^2$  sekuensial dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  sekuensial lebih besar dari pada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinieritas.

### 3.4.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu  $t$  dengan galat pada periode waktu  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji:

#### 1. Durbin Watson (uji D – W)

Menurut Ghazali (2013: 111) "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*firstorder autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen.”

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $dL$  dan  $dU$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ . Secara umum bisa diambil patokan :

1.  $0 < d < dL$  Menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi positif)
2.  $dL \leq d \leq dU$  Daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan)
3.  $dU < d < 4 - dU$  Gagal menolak hipotesis 0 ( tidak ada autokorelasi positif/ negatif)
4.  $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$  Daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan)
5.  $4 - dL < d < 4$  Menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi negatif)

## 2. Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. Menurut Ghozali (2013: 120) “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”. Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Galat (res\_1) acak (random)

$H_1$  : Galat (res\_1) tidak acak

### 3.4.3 Uji Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1.  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$  apakah galat (*distribusi error*) menyebar normal atau tidak
2. tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. “Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil” (Ghozali, 2017: 127). Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

#### 1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

#### 2. Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjuluran (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) dari sebaran galat. Menurut Ghazali, (2013: 108) nilai Z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran}$$

sampel.

Menurut Ghazali (2013: 140) untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogro-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data galat (residu) menyebar normal

$H_1$  : Data galat tidak menyebar normal.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jumlah Penduduk Miskin ( Y )

Jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini

data yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019. yang dinyatakan dalam satuan jiwa.

## **2. Produk Domestik Bruto (X1)**

Produk Domestik Bruto merupakan nilai seluruh barang atau jasa yang diproduksi di Indonesia pada periode waktu tertentu biasanya satu tahun. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2000-2019. Atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam satuan persen (%) per tahun.

## **3. Pengangguran (X2)**

Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam kelompok usia kerja yang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya. Data yang digunakan adalah pengangguran di Indonesia tahun 2000-2019. Pengangguran dihitung dalam satuan persen (%) per tahun.

## **4. Upah Minimum (X3)**

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Data yang digunakan adalah rata-rata upah minimum setiap provinsi di Indonesia tahun 2000-2019. Upah minimum dihitung dalam satuan rupiah per tahun.

